

DPRD dan Bupati Sepakati KUA PPAS APBD Kabupaten Demak 2023



DEMAK (KR) - Setelah melalui pembahasan bersama, DPRD dan Bupati sepakati dan menyetujui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2023. Tentunya dengan sejumlah saran dan perubahan maupun pergeseran sejumlah pos anggaran untuk peningkatan kinerja pelayanan publik.

Seperti disampaikan Ketua DPRD Demak HS Fahrudin Bisri Slamet, selain meningkatkan asumsi pertumbuhan ekonomi 4-5 persen, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga diusulkan naik Rp 10,016 miliar, dari semula Rp 456,483 miliar menjadi Rp 465,499 miliar. Di samping itu juga menambah besaran anggaran pada beberapa perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Penambahan anggaran dimaksud seperti pada Sekretariat DPRD, ditambahkan sebesar Rp 2,176 miliar pada program dukungan pelaksanaan tugas fungsi DPRD. Selanjutnya BPKPAD juga ditambah Rp 400 juta pada program pengelolaan keuangan daerah serta kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan anggaran.

"Juga penambahan pada kecamatan-kecamatan senilai Rp 7,440 miliar pada kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, sub kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan," tuturnya, pada Rapat Paripurna Persetujuan KUA PPAS APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2023, Senin (8/8).



Foto : sari jati

Pimpinan DPRD Demak HS Fahrudin Bisri Slamet, H Zayinul Fata, H Maskuri dan Nur Wachid, bersama Bupati dr Hj Eisti'anah serta Wabup KH Ali Makhsun, saat menandatangani kesepakatan dan persetujuan KUA PPAS APBD Kabupaten Demak 2023.

Selain itu juga diusulkan perubahan / pergeseran anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada program pengelolaan pendidikan, sub kegiatan penambahan ruang kelas baru sebesar Rp 100 juta. Digeser ke Dinas

Perhubungan pada program penyelenggaraan lalu lintas jalan dan angkutan jalan, kegiatan audit inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sub kegiatan pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal.

Adapun saran-saran yang diberikan berdasarkan hasil rapat koordinasi Pimpinan Komisi DPRD Demak antara lain, untuk Dinpermasdes P2KB agar melakukan penghitungan kembali biaya Pilkaes dan dibuat standarisasi biaya agar dipertimbangkan untuk diturunkan Rp 10.000 per DPT. Sedangkan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar segera melantik Kepala Sekolah yang sudah mengikuti pelatihan.

Sedangkan saran untuk BKPP, Inspektorat dan Pj Sekda adalah kaitannya reformasi birokrasi agar segera mengevaluasi kepala perangkat daerah yang kinerjanya kurang baik. Sementara saran untuk BPKPAD agar menghitung kembali Anggaran Dana Desa (ADD) supaya bisa naik sebesar 12 persen.

"Khususnya Dinputaru, agar segera menindaklanjuti penanganan terhadap tanggul-tanggul sebagai dampak pembangunan jalan tol dan banjir rob. Terutama pada tanggul kritis yang perlu penanganan secara khusus. Termasuk memetakan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan lakukan kerjasama dengan pihak terkait," tandasnya.

* **sjj**

KONDISI LIKUIDITAS DOMESTIK INDONESIA Dapat Kurangi Dampak Kebijakan Global

JAKARTA (KR) - Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, kondisi likuiditas domestik sebenarnya Indonesia dapat mengurangi dampak pengaruh kebijakan di Amerika Serikat atau global melalui kebijakan dalam negeri yang baik.

"Kita bisa mengendalikan supply uang di dalam sistem finansial kita, dan ini sudah dilakukan oleh Bank Indonesia. Pertumbuhan MO atau pertumbuhan uang primer mencapai 20 persen, bahkan angka terakhir menunjukkan pertumbuhannya di angka 28 persen. Artinya, sudah cukup banyak uang yang berada di sistem perekonomian kita," ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (9/8).

Sering disebutkan bahwa perekonomian dunia sedang menghadapi ancaman pengetatan likuiditas. Hal tersebut, lanjut Purbaya, berkaitan dengan tapering off yang dilakukan oleh Bank Sentral AS (The Fed), yang antara lain tujuannya untuk mengendalikan inflasi dan membawa ekonominya ke level yang lebih stabil, yaitu dengan cara menaikkan bunga dan mengesahkan kebijakan moneter.

"Di Amerika Serikat saat ini hampir resesi, diperkirakan tapering yang dilakukan bank sentral mereka juga hampir berakhir.

Jadi kami melihat ujung dari tapering tersebut sudah sedikit terlihat. Pengetatan lebih lanjut tidak akan terlalu signifikan. Artinya kendala global, dalam hal ini dampak negatif dari pengetatan kebijakan moneter di AS, yang kita hadapi akan tidak akan sebesar seperti yang diperkirakan sebelumnya," jelasnya.

Kadaan likuiditas dalam sistem finansial Indonesia yang lebih dari cukup antara lain ditunjukkan juga oleh indikator lainnya, seperti Rasio Alat Likuid atau Non-Core Deposit (AL/NCD) ada di level 133,4 persen dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) di level 29,9 persen pada Juni 2022. Nilai ini berada di atas threshold masing-masing minimal 50 persen dan 10 persen.

"Intinya likuiditas perbankan nasional tetap terjaga dengan baik. Perlu ditekankan lagi di sini bahwa kondisi likuiditas tersebut bukan hanya tergantung kepada kondisi global saja, karena sebenarnya kondisi likuiditas perbankan ada di bawah kendali kita sendiri. Bank sentral kita senantiasa menjaga likuiditas perbankan dan memonitor terus dari waktu ke waktu. Dan KSSK sudah menemukan cara yang jitu untuk memelihara atau menjaga likuiditas perbankan nasional," tambah Purbaya.

(San)-d

PEMBINAAN GURU DI SMAN 1 BANGUNTAPAN Sultan: Kewenangan Penuh Kepala Dinas

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan HB X menegaskan, tidak pernah mengambil suatu keputusan untuk guru dan Kepala SMAN 1 Banguntapan Bantul. Jika memang ada unsur pemaksaan dipastikan bertentangan dengan bunyi Permendikbud No 45 Tahun 2014 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

"*Kan gitu*. Karena yang bersangkutan dalam hal ini guru-guru itu dan kepala sekolah adalah pegawai negeri, sehingga yang punya kewajiban membina itu atasannya langsung. Berarti, Kepala Dinas," tegas Sultan usai rapat paripurna di DPRD DIY, Selasa (9/8) tentang kelanjutan persoalan dugaan pemaksaan pengenaan jilbab salah seorang siswa perempuan di SMAN 1 Banguntapan.

Dijelaskan Sultan, yang dilakukan guru dan kepala sekolah itu bukan pelanggaran hukum, baik perdata maupun pidana. Namun, masalah disiplin, karena tugas PNS harus melaksanakan ketentuan peraturan pemerintah. Tapi hal itu melanggar. Berarti ketika Gubernur bertanya ke Kepala Dinas, ada satu kepala sekolah dan

tiga guru yang sementara itu tidak boleh mengajar. Di sisi lain satuan tugas atau tim bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi di sekolah itu.

Dalam perkembangannya, Gubernur mengaku terus melakukan komunikasi. Terhadap persoalan itu, dinyatakan sudah ada keputusan dari tim dan yang penting adalah bagaimana terjadi rekonsiliasi. Tim juga sudah melakukan pendekatan. Namun, karena orang tua siswa tersebut bekerja di luar kota, harus ada izin terlebih dulu.

"Kalau si anak tetap nyaman di sekolahnya silakan. Tapi kalau tidak, sekolah wajib mencari alternatif sekolah lain. Sedangkan, untuk guru dan kepala sekolah yang berhak membina adalah kepala dinas. Ini masalah etika, disiplin kepegawaian. Itu sepenuhnya kewenangan di kepala dinas," ungkapny.

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menyatakan, solusi dari polemik ini dapat dimulai dengan saling bermaafan dan menyambung silaturahmi. Karena ini juga termasuk budaya yang adiluhung dan dianjurkan semua agama.

(Awh/Bro)-d

AWALI PANEN DI LERENG GUNUNG SINDORO Ganjar Petik 12 Daun Tembakau

TEMANGGUNG (KR) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memetik 12 daun tembakau untuk mengawali masa panen tembakau di Lereng Gunung Sindoro di Desa Giripurno, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Selasa (9/8).

Pada wiwit tembakau atau petik awal pada panen daun tembakau itu, orang nomor satu di Provinsi Jateng tersebut didampingi perangkat desa dan tokoh masyarakat serta disaksikan petani. Sejak pagi masyarakat telah menunggu pemanenan namun baru bisa dilakukan menjelang sore hari, setelah Ganjar datang. Usai wiwit tembakau Ganjar lantas beramah tamah dengan warga.

Ganjar mengatakan pemetikan 12 daun tembakau sesuai petung Jawa hari saat memetik neptu Selasa Pahing. Hitungan dari neptu Selasa yaitu 3 dan neptu Pahing yaitu 9. "Selalu saja perayaannya seperti itu. Tadi 12 daun yang dipetik. Ada hitungannya karena Selasa Pahing, jadi 12. Dia menerangkan ada kepercayaan di

masyarakat setempat akan simbol-simbol dan mempunyai filosofi tersendiri dari seluruh apa pun yang ada di desa.

Ganjar menjelaskan wiwitan tembakau merupakan tradisi di Kabupaten Temanggung. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun, tepatnya untuk mengawali masa panen tembakau. Acara kali ini berlangsung meriah dibandingkan tahun lalu karena sebelumnya terhalang dengan pandemi.

"Tradisi ini selalu dilaksanakan tiap tahun. Selama pandemi tidak banyak yang bisa melaksanakan tetapi hari ini mereka bisa melaksanakan wiwit, jadi mulai awal panen. Tentu semua berdoa agar hasil panen tembakaunya bagus," kata dia.

Menurut Ganjar ketika masa panen tembakau sudah tiba, persoalan yang selalu menjadi pertanyaan adalah berapa harga yang dipatok oleh pabrik selaku pembeli. Maka dari itu Ganjar berpesan agar pabrik atau pembeli tembakau bisa memberikan harga bagus bagi petani.

(Osy)-f



KR-Surya Adi Lesmana

BEDHAYA PURNAMAJATI: Pergelaran Tari Bedhaya Purnamajati Fragmen Golek Jayusman Jumeneng Nata ditampilkan di Pendapa Agung Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Selasa (9/8) malam. Pementasan ini sebagai peringatan 60 Tahun Yayasan Pamulangan Beksa Sasmita Mardawa bertema 'Spirit Tari Klasik Yogyakarta'.

PRESIDEN HITUNG KEMBALI ALOKASINYA DI APBN

Anggaran Bansos Akan Ditambah

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo akan menghitung lagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menambah pemberian bantuan sosial (bansos). Sejauh ada kelebihan anggaran, maka alokasi bansos akan ditingkatkan.

"Nanti kalau APBN-nya ada uang lebih, nanti akan kami, insya Allah akan kami tambahkan," kata Jokowi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (9/8).

Jokowi mengatakan hal itu saat menyerahkan bantuan modal kerja (BMK) dan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Pasar Sungai Duri, Kabupaten Bengkulu, Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (9/8).

Saat memberikan bantuan, Jokowi berpesan agar masyarakat memanfaatkan BMK senilai Rp 1,2 juta

sebagai tambahan modal kerja atau modal usaha. Bantuan tersebut juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang produktif, tambahnya.

"Jangan ya, jangan dibelikan handphone. Kalau bisa, dipakai untuk tambahan modal kerja, modal usaha. Kalau enggak, ya dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang produktif. Jangan dipakai untuk beli pulsa," katanya.

Sementara itu, terkait BLT, Jokowi menyarankan agar uang bantuan tersebut digunakan untuk membeli sembako. "Ibu-ibu, ini ya,

yang Rp 300 ribu silakan untuk pembelian sembako dan minyak goreng ya; namanya untuk bantuan sosial," ujar Jokowi.

Selain menyerahkan BMK dan BLT kepada peserta PKH, Presiden juga memberikan bantuan kepada para pedagang kaki lima dan pedagang pasar sembari berkeliling dan menyapa para pedagang.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan itu ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, dan Bupati Bengkulu Sebastianus Darwis.

(Ant)-d

TRADISI BULAN SURTA DI TLOGOPUCANG

Nyadran Kiai Kramat, Merawat Kearifan Lokal

TEMANGGUNG (KR) -

Kokok ayam hutan bersautan menyambut kedatangan warga yang hendak menggelar tradisi *nyadran* bulan Sura di Makam Kiai Kramat yang berada di perbukitan di Desa Tlogopucang Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, Selasa (9/8). Ribuan warga beriring ke makam *pepundhen* desa untuk berdoa dan bersyukur. Anak-anak, tua muda, lelaki dan perempuan tak mau ketinggalan.

Mereka membawa *tenong* berisi nasi putih, ingkung ayam jantan, jajan pasar dan berbagai jenis makanan tradisional serta buah. Tenong tersebut dipikul dan sebagian dijinjing. Tidak hanya dari delapan dusun di Desa Tlogopucang, peserta *nyadran* juga dari luar desa, terutama warga yang mem-



KR-Zaini Arrosyid

Ribuan warga Desa Tlogopucang Kandangan mengikuti tradisi nyadran bulan Sura di areal makam Kiai Kramat.

punya leluhur di desa tersebut. Mereka berharap mendapat berkah, limpahan rizeki dan kesehatan dalam kehidupan.

Kepala Dusun Tlogopucang Tengah, Adhoni mengatakan, awal mula sadranan berasal dari nazar warga Tlogopucang di zaman awal kemerdekaan. Nadzar itu menyebutkan akan menggelar sadranan ji-

ka Belanda sudah pergi dari Desa Tlogopucang dan tidak menjajah kembali.

Ia mengatakan, sadranan sekaligus untuk menjalin kerukunan dan kegotongroyongan serta menanamkan kearifan lokal pada generasi penerus. Kearifan itu seperti mencintai dan menjaga keasrian lingkungan alam.

Seorang sesepuh Sudarno mengatakan, semula sad-

ranan digelar pada 10 Sura, tetapi karena banyak warga yang menjalankan ibadah puasa Asyura kemudian di geser pada 11 Sura.

"Kami berharap dalam kehidupan ini meningkat kesejahteraan, selalu sehat, mendapat rizeki banyak dan dalam ridlo Allah," katanya.

Sementara itu pada tradisi *nyadran* diawali doa bersama dipimpin pemuka agama setempat. Selanjutnya makan bersama dari tenong yang dibawa. Tiap satu keluarga membawa satu tenong.

Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Temanggung Bejo Tursiyam mengatakan, sadranan sebagai even adat harus dilestarikan dan selama ini mendapat dukungan pemerintah, baik Pemkab Temanggung maupun pemerintah desa.

(Osy)-d